



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN
DISABILITAS DAKSA DI UPT DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**NOVALYA SARI
2063201111**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN
DISABILITAS DAKSA DI UPT DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik Program Pendidikan Strata
Satu pada Fakultas Ilmu Administrasi

NOVALYA SARI
2063201111

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso KM.8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

STATUS : AKREDITASI B

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : NOVALYA SARI

NIM : 2063201111

Tanda Tangan

: 

Tanggal

: 1 JULI 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

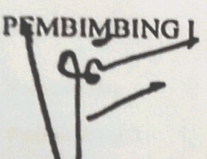
Jalan Yos Sudarso KM.8 Rumbal, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

STATUS : AKREDITASI B

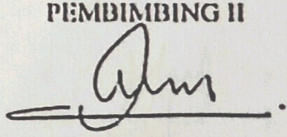
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : NOVALYA SARI
Nim : 2063201111
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN DI
UPT PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DAKSA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU.

PEMBIMBING I


Wasiah Sufi, S.Sos., M.Si
NIDN. 1001087201

PEMBIMBING II


Eka, S.Sos., M.Soc.Sc
NIDN. 1001078303

MENGETAHUI :
KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK


Rini Murni, S.Sos, M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama : NOVALYA SARI
NIM : 2063201111
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

Telah berhasil dipertahankan hadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Sulaiman Zuhdi, S.Sos., M.Si ()
Pembimbing 2 : Eka, S.Sos., M.Soc.Sc ()
Penguji : Alexsander Yandra, S.IP., M.Si ()
Penguji : Pebriana Marlinda, S.Sos., M.AP ()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 10 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi disusun dalam rangka menyelesaikan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis mengangkat sebuah topik yang sesuai dengan latar belakang studi penulis di Jurusan Administrasi Publik yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa Di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau**", penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bagi berbagai pihak, penulis juga menyadari bahwa ada bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu Khuriyatal Husna, S. Sos, M. PA selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

3. Ibu Dr. Li Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Wasiah Sufi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang dengan sabar dalam membimbing penulis dan telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan bimbingan bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Eka, S.Sos., M.Soc.Sc selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan kritik, saran dan petunjuk bagi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah banyak memberikan bimbingan
8. Ibu Kepala UPT Dinas Sosial Provinsi Riau yang telah memberikan izin penelitian bagi penulis.
9. Ayah, Ibu, Suami dan Anak-anak tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa serta inspirasinya sehingga penulis bisa sampai pada tujuan dalam menyelesaikan kuliah ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat pada penulis selama pembuatan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Pekanbaru, Mei 2024
Penulis,

NOVALYA SARI
NIM : 2063201111

ABSTRAK

Nama : Novalya Sari
Study program : Administrasi Publik
Title : Implementasi Kebijakan Program Pembinaan
Disabilitas Daksa Di UPT Dinas Sosial
Provinsi Riau.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Disabilitas Di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau. Teori yang digunakan adalah teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn dalam buku Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis yang mengemukakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi Antar Badan, Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dan Sikap Pelaksana, Kinerja kebijakan Karakteristik Badan Pelaksana, dan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berdasarkan desain deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran pembinaan yang masih sangat terbatas, kurangnya tenaga pendukung profesional masih menjadi hambatan dalam pembinaan disabilitas di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau dan Tidak adanya sertifikat sebagaitanda bukti tertulis yang dikeluarkan UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa menjadi kendala untuk mencari pekerjaan maupun membuka lapangan kerja baru bagi disabilitas.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembinaan

ABSTRACT

Name : Novalya Sari
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Program Pembinaan
Di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau.

This thesis discusses the implementation of the Disability Development Policy at the UPT for the Empowerment of People with Physical Disabilities, the Riau Province Social Service. The theory used is the implementation theory from Van Metter and Van Horn in the book *Public Policy Based on Dynamic Policy Analysis* which suggests several variables that can influence policy implementation, namely Inter-Agency Communication, Policy Standards and Targets, Resources, Social, Economic and Political Environment and Implementing Attitudes, Policy Performance, Characteristics of the Implementing Agency, and. This research uses a qualitative research method based on a qualitative descriptive design. The results of this research show that the coaching budget is still very limited, the lack of professional support staff is still an obstacle in disability coaching at the UPT for the Empowerment of Persons with Physical Disabilities and the absence of certificates as written evidence issued by the UPT for the Empowerment of People with Physical Disabilities is an obstacle to finding work or opening a field. new jobs for people with disabilities.

Keywords: Implementation, Policy, Development

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Konsep Teoritis	15
2.1.1 Kebijakan publik	15
2.1.2 Proses kebijakan publik	20
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik	22
2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan	28
2.2 Program	29
2.2.1 Teori Program	29
2.2.2 Konsep Implementasi Program Penilaian Kinerja.....	31
2.3 Penyandang Disabilitas Daksa.....	34
2.3.1 Pengertian Tunadaksa	34
2.3.2 Jenis-jenis Tunadaksa	36
2.3.3 Karakteristik Tunadaksa	37
2.4 Penelitian Terdahulu.....	42
2.5 Fokus Penelitian.....	44
2.6 Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Lokasi Penelitian	47
3.2 Jenis dan Sumber Data	48
3.3 Lokasi Penelitian	48
3.4 Desain Penelitian	49
3.5 Teknik Pemilihan Informan	49
3.6 Subjek dan Objek Penelitian	50
3.7 Teknik Pengumpulan Data	50
3.8 Teknik Analisis Data	52

BAB IV	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	54
	4.1 Sejarah Singkat UPT Dinas Sosial Provinsi Riau	54
	4.2 Visi dan Misi	55
	4.3 Struktur Organisasi	55
	4.4 Tugas dan Tanggung Jawab	56
	4.1 Aktifitas UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.....	61
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	63
	5.1 Implementasi Kebijakan Program Pembinaan	63
	5.1.1 Komunikasi Antar Badan	63
	5.1.2 Standar dan Sasaran Kebijakan	65
	5.1.3 Sumber daya	66
	5.1.4 Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik	70
	5.1.5 Sikap Pelaksana	72
	5.1.6 Kinerja Kebijakan	73
	5.1.7 Karakteristik badan pelaksana	75
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	79
	6.1 kesimpulan	79
	6.2 Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penyandang Disabilitas Pada UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.....	12
Tabel 1.2	Anggaran UPT Dinas Sosial Provinsi Riau	13
Tabel 1.3	Masalah Penyandang Disabilitas di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau	13
Tabel 2.4	Penelitian-penelitian terdahulu	48
Tabel 2.5	Kerangka Pemikiran	55
Tabel 4.1	Struktur Organisasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1.1 Struktur Organisasi UPT Dinas Sosial Provinsi Riau	67
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga Negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur ataupun diperjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan definisi penyandang disabilitas di atas maka penyandang disabilitas berdasarkan jenisnya sebagai berikut :

a. Disabilitas Fisik

Setiap orang yang mengalami keterbatasan/disfungsi organ motorik (amputasi, polio, paraplegia, cerebral palsy dan terhambat pertumbuhan struktur tulang)

b. Disabilitas Intelektual

Setiap orang yang mengalami keterbatasan/disfungsi intelektual seperti melemahnya daya ingat/memori sehingga menghambat kemampuan/daya pikir (slowliner, downsyndrom dan sebagainya)

c. Disabilitas Mental

Setiap orang yang mengalami gangguan perilaku yang akan menghambat kemampuan interaksi baik interpersonal maupun lingkungan (autis, hiperaktif dan sebagainya)

d. Disabilitas Sensorik

Setiap orang yang mengalami keterbatasan/disfungsi organ keinderaan yang akan menghambat penglihatan, pendengaran dan komunikasi verbal serta kepekaan rasa (disabilitas netra, disabilitas tuli, disabilitas wicara/bibir sumbing dan albino)

Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Pemerintah wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses atau kemudahan dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga

Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam

aspek untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup dan berkembang secara penuh sesuai dengan potensi yang dimilikinya termasuk pada anak dengan berkebutuhan khusus.

Pemahaman masyarakat umum mengenai anak berkebutuhan khusus masih sangat minim, kebanyakan mereka menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak memiliki kemampuan apapun. Selama ini, berbagai stigma negatif seringkali diberikan kepada anak penyandang disabilitas, baik secara implisit atau eksplisit. Stigma ini hadir akibat pengaruh stereotip bahwa anak penyandang disabilitas memiliki kekurangan dan tidak mampu melakukan berbagai hal dengan baik. Bahkan tak jarang hal ini menjadikan anak penyandang disabilitas termarginalkan dan dilupakan hak-haknya yang sama seperti manusia lainnya oleh sebagian masyarakat.

Banyak dari bagian masyarakat yang masih memandang rendah anak berkebutuhan khusus, anak-anak ini dianggap tidak memiliki kemampuan apapun sehingga masyarakat kerap mengesampingkan masa depan mereka. Kekurangan selalu melekat pada setiap individu manusia sehingga menciptakan beberapa kelompok manusia yang berbeda, dan pada akhirnya terkucilkan oleh masyarakat sosial. Perbedaan yang membuat mereka banyak dikucilkan dalam lingkungan masyarakat. Saat ini masyarakat di Indonesia masih mengenalnya dengan penyandang disabilitas.

Kemandirian pada penyandang disabilitas diartikan sebagai mampu menghadapi kondisi yang mana kondisi tersebut bisa menjadikan disabilitas

untuk hidup mandiri dalam berfikir, berperilaku, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Lewat kemandirian, penyandang disabilitas bisa memilih arah hidupnya untuk menjadi berkualitas. Penyandang disabilitas yang tidak menyerah akan mampu. Perkembangan kepribadian setiap diri individu, merupakan salah satu unsur psikis yang cukup besar dalam proses pengalaman diri setiap individu.

Setiap individu akan merasakan kepuasan dalam dirinya ketika mampu melakukan pengalaman diri terhadap gerak kehidupan di sekitarnya melalui pengembangan kepribadian yang dimiliki, serta diyakini gerak hidupnya dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Eksistensi perkembangan kepribadian, sangat dipengaruhi oleh bagaimana seorang individu memiliki pemahaman lebih tentang dirinya. Pemahaman tentang baik maupun buruk, tinggi atau rendah, kuat maupun lemah terhadap kualitas diri individu tersebut, dan segala hal yang berkaitan dengan dirinya, sehingga membentuk sebuah unsur psikis yang disebut dengan konsep diri.

Melihat fakta yang ada di lapangan, tentu masih banyak dari penyandang disabilitas daksa yang memiliki rasa percaya diri yang rendah serta kurang optimal. Semestinya kepercayaan diri penyandang disabilitas daksa itu menjadi suatu hal yang harus dimiliki, menjadi prioritas utama dan harus dioptimalkan. Permasalahan tersebut perlu ditelaah lebih jauh, mengenai pola pembinaan dalam meningkatkan kepercayaan diri disabilitas daksa dalam mengoptimalkan kepercayaan diri tersebut.

Pola pembinaan merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk membantu mengembalikan fungsi sosial bagi penyandang disabilitas tubuh adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas tubuh yang telah ditempuh melalui beberapa kegiatan pelayanan bimbingan, baik melalui sistem panti maupun non panti. Sistem pusat pelayanan disabilitas tubuh merupakan wujud perhatian pemerintah.

Di Provinsi Riau sampai sekarang belum ada data yang terbaru yang dapat mendeskripsikan secara faktual dan terkini tentang keadaan penyandang disabilitas. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Lembaga Surveryor Indonesia terhadap penyandang disabilitas di Provinsi Riau Tahun 2009 sebanyak 12.534 orang. Sebanyak 3.987 orang atau 32% masuk dalam jenis disabilitas fisik atau daksa yang tersebar pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Mengingat banyaknya jumlah disabilitas fisik/daksa maka Pemerintah Provinsi Riau mulai melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui lembaga kesejahteraan sosial yang difokuskan pada jenis disabilitas daksa. Pembentukan lembaga kesejahteraan sosial yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau.

UPT Dinas Sosial Provinsi Riau Sebagai pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas daksa. Dengan fungsi; melaksanakan kegiatan pelayanan sosial. Pengembangan mutu

layanan penyandang disabilitas daksa, Identifikasi, seleksi dan penilaian (assesment) dalam rangka pelayanan bagi penyandang disabilitas daksa Penyelenggaraan pelayanan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa. Penyelenggaraan rujukan bagi penyandang disabilitas. Adapun program tersebut diberikan kepada penyandang disabilitas daksa yang disesuaikan dengan kebutuhan serta dilihat dari latar belakang kedisabilitasannya terlebih dahulu.

Program UPT Dinas Sosial Provinsi Riau Sebagai bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan hasil assesment awal, jika diketahui bahwa klien mengalami permasalahan pada mental dan sosial, tetapi tidak bermasalah dengan kondisi fisiknya, seperti; mengalami gangguan interaksi sosial, isolasi sosial hiperaktif, depresi, stres dan trauma yang menyebabkan klien sulit dalam mengikuti proses rehabilitasi.

Rehabilitasi sosial ini diberikan pihak lembaga melalui pekerja fungsional seperti pekerja sosial (peksos), psikolog, instruktur mental dan spiritual dan instruktur bimbingan fisik. Bentuk bimbingan yang diberikan dalam pelayanan rehabilitasi sosial ini meliputi; bimbingan mental dan bimbingan sosial. Bimbingan mental diberikan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan dan harga diri daripada warga binaan agar terbentuk mental yang kuat dan tidak merasa minder dengan kondisi yang dialami serta dapat hidup mandiri.

Bimbingan mental yang diberikan berupa; bimbingan keagamaan bimbingan sosial kemasyarakatan, bimbingan olahraga, dan bimbingan kedisiplinan. Assessment dilakukan untuk mendapat kesesuaian kebutuhan peserta saat rehabilitasi, hal ini tentunya telah melalui kesepakatan antara pihak lembaga dengan orangtua penyandang disabilitas daksa serta penyandang disabilitas daksa itu sendiri.

Melalui pelayanan dan rehabilitasi yang diberikan kepada penyandang disabilitas diharapkan memiliki kepercayaan diri, mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu melakukan orientasi mobilitas, mampu melakukan aktifitas atau kegiatan sehari-hari dan memiliki keterampilan usaha. Pelaksanaan program Pembinaan Pemberdayaan Sosial (dalam) dan Program Pembinaan Pemberdayaan Sosial (luar) untuk penyandang disabilitas daksa pada UPT Dinas Sosial Provinsi Riau bertujuan untuk:

1. Penghapusan diskriminasi bagi penyandang disabilitas daksa dalam memperoleh layanan sosial.
2. Pemenuhan hak penyandang disabilitas daksa dalam menggali dan menyalurkan potensi untuk memperoleh kesamaan kesempatan dalam bekerja dan pengembangan usaha.
3. Mendorong kemandirian penyandang disabilitas daksa dan meningkatkan perannya di masyarakat.
4. Mengajak keluarga dan masyarakat membukakan kesempatan untuk penyandang disabilitas dapat diterima dalam kehidupan sosial.

5. Mempublikasikan Kebijakan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas daksa yang dilaksanakan UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

Yang menjadi sasaran dalam Program Pembinaan pemberdayaan penyandang disabilitas daksa UPT Dinas Sosial Provinsi Riau adalah:

1. Penyandang Disabilitas Daksa yang mampu baca tulis dan berasal dari keluarga tidak mampu.
2. Keluarga penyandang disabilitas daksa yang akan mengikuti program pemberdayaan UPT Dinas Sosial Provinsi Riau .
3. Masyarakat
4. Dunia Usaha/industri yang berdaya saing
5. dan Pihak terkait lainnya

Suatu program akan berjalan dan terlaksana apabila faktor-faktor pendukung terpenuhi dengan baik. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

- a. Aspek Eksternal Faktor eksternal yang dimaksud yaitu lingkungan dan ekonomi. Penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan dari aspek eksternal baik lingkungan, ekonomi, dan sosial.
- b. Komunikasi Komunikasi akan menjadi faktor pendukung apabila arusnya jelas dan tegas. Komunikasi yang disampaikan jelas dan akurat sesuai dengan kebijakan sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan dari adanya program bagi penyandang disabilitas.

c. Sumber Daya (Anggaran) merupakan faktor pendukung keberhasilan implementasi pemenuhan hak fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang sangat dibutuhkan. Secara umum anggaran untuk fasilitas publik berupa sarana dan prasarana di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau harus sesuai dengan kebutuhan.

Implementasi pemenuhan hak merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan, guna memenuhi hak-hak masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan. Khususnya untuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, serta masyarakat yang adil, makmur, dan terhindar dari diskriminasi sebab memiliki kebutuhan yang berbeda dari manusia normal pada umumnya.

Program kebijakan harus diimplementasikan agar terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, Pemerintah dan Dinas Sosial harus memperhatikan dan memastikan agar hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik terpenuhi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

Dengan adanya pelatihan tersebut pihak penyandang disabilitas dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan kerja dan melatih kemampuan kerja agar lebih mandiri serta mencegah diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa UPT Dinas Sosial Provinsi Riau sudah melakukan upaya untuk Implementasi kebijakan program Pembinaan Penyandang Disabilitas Daksa.

Program Pembinaan yang sediakan oleh UPT Dinas Sosial Provinsi Riau berupa keterampilan - keterampilan yaitu Tata Rias, Menjahit dan Komputer. Pembinaan di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa tersebut diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang berjumlah 30 orang di uraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa

NO	NAMA	JENIS DISABILITAS
1	Andri Sinaga	disabilitas fisik
2	Arief Ramadhan	disabilitas fisik
3	Muhammad Tedy Rahmadi	disabilitas fisik
4	Dian Melani	disabilitas fisik
5	Weni Angelina Jasri	disabilitas fisik
6	Pebri	Disabilitas Fisik
7	Wandira	Disabilitas Fisik
8	Siska Widia	disabilitas fisik
9	M. Ridzuan	disabilitas fisik
10	Syahrul	disabilitas fisik
11	Nurul Fatimah	disabilitas fisik
12	fidia Nuraini	disabilitas fisik
13	M. Yusuf	Sensorik (rungu wicara)
14	M.Asman Arbindo	Sensorik (rungu wicara)
15	Abd. Rahim	disabilitas fisik
16	Rezti Ananda	Sensorik (rungu wicara)
17	Syadam Frisky	Disabilitas Intelektual (grahita)
18	Yohana	Sensorik (rungu wicara)
19	Yudia Atika	Sensorik (rungu wicara)
20	Heriska Dwi Delni Yanti	Sensorik (rungu wicara)
21	Ahmad Akbar Pratama	Sensorik (rungu wicara)
22	M.Jasri Pulungan	Disabilitas fisik
23	Riki Ayub	disabilitas fisik
24	Juari Yandi	Sensorik (rungu wicara)
25	Irfan Fadhillah Azuar	Disabilitas Intelektual (grahita)
26	Festus C. Enoni Sitinjak	Sensorik (rungu wicara)
27	Uswatun Hasanah	disabilitas fisik
28	Novrio Apriyal Kurniawan	disabilitas fisik

29	Nur Safitri	disabilitas fisik
30	Farizan Fahmi	Disabilitas Fisik

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, 2023

Program Pembinaan pemberdayaan penyandang disabilitas daksa dengan Rencana Kegiatan Anggaran UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel 1.2 Anggaran UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa

N0	URAIAN SUB KEGIATAN	JUMLAH
1	Penyediaan Permakanan	Rp. 601,422,000,-
2	Penyediaan sandang	Rp. 209,310,584,-
3	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 1,650,000,-
4	Penyediaan Kesehatan di dalam panti	Rp. 17,024,756,-

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, 2023

Dari temuan penelitian, terdapat beberapa masalah penyandang disabilitas antara lain :

1. Bimbingan keterampilan bagi disabilitas daksa banyak yang tidak sesuai dengan minat dan bakat.
2. Kurangnya peralatan keterampilan untuk sarana penunjang pembinaan disabilitas daksa
3. Kurangnya tenaga pembinaan bagi disabilitas daksa.
4. Rohaniawan yang tidak tersedia untuk yang beragama non islam
5. Tidak adanya sertifikat sebagai tanda bukti kemampuan disabilitas daksa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.”***.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka masalah yang ada bisa dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.?

1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah

Secara teoritis penelitian ini diharapkan

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Pembinaan di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui Kendala- kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan program pembinaan di UPT

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara lain:

A. Kegunaan Teoritis

- 1) Mengetahui secara rinci kendala yang dialami oleh pihak UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.
- 2) Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis tentang bentuk dan pengaruh Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

B. Kegunaan Akademik

- 1) Bagi perguruan tinggi khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik menjadi referensi atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.
- 2) Menambah wawasan berpikir tentang Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Disabilitas Daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

C. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan informasi kepada pendidik panti agar kiranya lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan guna untuk meningkatkan kapasitas atau skil bagi penyandang disabilitas tubuh.
- 2) Memberikan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pegawai di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Dinas Sosial Provinsi Riau
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan wacana baru yang dapat memberikan inspirasi kepada kita.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka, Implementasi Kebijakan Pembinaan disabilitas daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau telah dilaksanakan dengan lembaga-lembaga dalam pembinaan guna mendukung penyelenggaraan tugas tersebut sehingga seluruh rencana kerja yang sudah ditentukan dapat tercapai dengan sebaik mungkin sehingga program pembinaan disabilitas dalam berjalan dengan baik pula.

Adapun faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pembinaan disabilitas daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau adalah:

- Anggaran pembinaan yang masih sangat terbatas.
- Kurangnya tenaga pendukung profesional masih menjadi hambatan dalam pembinaan disabilitas daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan anggaran dalam mengimplementasikan Kebijakan Pembinaan disabilitas daksa di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

2. Sebaiknya UPT Dinas Sosial Provinsi Riau tetap selalu menjalin kerjasama kepada pihak-pihak lain yang mendukung terlaksananya pembinaan di UPT Dinas Sosial Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Sy., (1988), *Perkembangan Penerapan Studi Implementasi (Action research and Case Studies)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Jakarta.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori danaplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian & Teknik penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong (2000).
- Asep Karyana dan Sri Widati. 2013. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung Pustaka Setia
- Aziz, Safrudin. 2015. *Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus. Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Gava Media.
- Abdul Wahab, Solichin. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta
- Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Kebijakan Publik)*, Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ariska Lilis (2021). *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir*. Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Budi Winarno. 2012 *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*-Yogyakarta: CAPS.
- Darmadi, Hamid. (2014). *Metode penelitian pendidikan sosial*. Bandung: Alfabet.
- Diah Ayu fajrihani Amellia 2023. *Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Intelektual di SLB BCD Nusantara Depok*. Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Dwiyanto, A. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Fenti Hikmawati, (2011). *Bimbingan Konseling Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (Siyoto & Sodik. 2015).
- George, Ritzer. 2014. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy*. Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Eka Kartini (2022). *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Kota Batam*. Skripsi Tidak Diterbitkan.
- Riant, Nugroho D. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia
- David Easton (2015)

- Ramandita Shalfiah. 2013. *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 3. " (Westra, 1989). Tunadaksa. Jakarta: PT LUXIMA METRO MEDIA.
- Mangunsong, F. (2011). *Psikologi dan pendidikan anak kebutuhan khusus*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Kampus Baru UI. Hikmawati, 2011 (Somantri, 2007),
- Mustari, Nuryanti, (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ripley, Randal dan Grace. (2016). *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*. Chicago: The Dorsey Press
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Siyoto, S. & Sodik, A. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI J Lexy, Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2016. Bandung PT. Remaja Rosdakarya